



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

KPU Seluma Banyak Buat SPj Fiktif

BENGKULU, BE - Kemarin (4/3), Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menggelar sidang kedua kasus dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seluma, 2018. Kasus korupsi ini menyeret dua orang terdakwa, Bendahara KPU Seluma Anggit dan mantan Sekretaris KPU Seluma Harmazan. Dari sidang ini diketahui banyak spj fiktif yang dibuat oleh KPU Seluma.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seluma menghadirkan lima orang saksi pada sidang ke-dua tersebut. Lima orang saksi dihadirkan untuk membuka fakta baru terkait penyelewengan anggaran di KPU Seluma. Lima saksi yang dihadirkan diantaranya, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semidang Alas, Amrullah dan Sekretaris Panitia PPK Semidang Alas, Saimin. Kemudian, pemilik Hotel Arnanda, Lengga. Pemilik foto copy, Salam.

Pemilik Kantin Sederhana, Suhateni. Semua keterangan saksi dihadapan persidangan mengatakan, bahwa banyak kegiatan yang tidak sesuai SPj dilakukan KPU Seluma.

Seperti yang disampaikan pemilik Lengga, pemilik hotel Arnanda. Selama 2018, KPU Seluma menyewa hotel untuk kegiatan sebanyak 2 kali. Tetapi Lengga terkejut saat hakim menunjukkan jika ada 8 SPj kegiatan KPU Seluma di Hotel Arnanda. Satu kali sewa aula di Hotel tarifnya Rp 1,5 juta.

"Saya sama sekali tidak tahu kalau sampai 8 kali yang mulia, setahu saya hanya dua kali KPU melakukan kegiatan di hotel," jelas Lengga.

Hal senada diungkapkan pemilik fotokopi, Salman. Selama tahun 2018 Salman mengaku menerima pembayaran untuk jasa fotokopi dari KPU Seluma Rp 15 juta. Padahal faktanya, anggaran yang dikeluarkan untuk foto copy Rp.26 juta selama 2018.

"Sesuai tagihan saya terima Rp 15 juta, tidak tahu kalau anggarannya Rp 26 juta," ujar Salman.

Bukan hanya sewa hotel dan foto copy saja diselewangkan, tetapi anggaran di Kantin juga diselewangkan. Suhateni selaku pemilik kantin mengaku menerima pembayaran Rp 2 juta selama tahun 2018 untuk konsumsi, tetapi dalam Spj, ditulis Rp 6 juta.

"Saya hanya terima Rp 2 juta, bukan Rp 6 juta," jelas Suhateni kepada hakim.

Sementara itu, keterangan Ketua PPK Semidang Alas, Amrullah mengatakan gaji PPK dan PPS se-Kecamatan Semidang tertunggak sejak Oktober sampai Desember 2018. Total gaji yang tertunggak tersebut Rp 154 juta. Meski sempat menunggak, akhirnya gaji dibayarkan pada Desember 2019.

"Gaji sempat tertunggak, totalnya Rp 154 juta, tetapi dibayarkan setahun kemudian," jelas Amrullah.

Dua orang terdakwa tidak banyak membantah keteran-

gan saksi yang dihadirkan JPU. Bahkan keterangan terdakwa Anggit semakin membuktikan banyak sekali penyelewengan anggaran di KPU Seluma. Dia mengaku bahwa KPU Seluma banyak memiliki cap (stempel), mulai dari cap hotel, cap fotokopi, cap kantin dan cap lainnya. Cap tersebut digunakan untuk membuat SPj fiktif. Tetapi Anggit mengaku cap tersebut sudah ada sejak dirinya belum menjadi bendahara.

"Sudah sejak lama kebiasaan tersebut dilakukan, karena sudah kebiasaan jadi saya terjebak mengikuti tindakan yang salah," jelas Anggit yang menegaskan bakal mengatakan semua kebobrokan KPU Seluma jika tiba giliran dia memberikan keterangan.

JPU Kejari Seluma, Dody Yansah Putra SH mengatakan, dari lima orang saksi yang dihadirkan sudah banyak fakta terungkap. Termasuk cap yang memang banyak ditemukan dibagian keuangan. Lima orang saksi tersebut hanya awal, total ada 70 orang saksi yang akan dihadirkan jaksa untuk membuat terang dan mengungkap tuntas kasus korupsi yang merugikan negara Rp 1,4 miliar dari anggaran Rp 21 miliar.

"Total ada 70 saksi kita hadirkan. Lima orang saksi yang kita hadirkan tadi saja sudah banyak mengungkap fakta. Masih ada saksi lain yang akan kita hadirkan, salah satunya komisioner," pungkas Dodi. (167)